

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jl. Jemur Andayani I Telp. (031) 8477551 Fax (031) 8477404 Email: bkdjatim@gmail.com Website: bkd.jatimprov.go.id SURABAYA 60236

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR : 871/9311/204.2/2022

TENTANG

PENETAPAN TAMBAHAN ALOKASI FORMASI KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

Menimbang

- a. Ketentuan Pasal 8 Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur bahwa kebutuhan jabatan dan kualifikasi pendidikan untuk Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah disusun berdasarkan perencanaan kebutuhan formasi dan proporsi kepangkatan;
- b. Surat Gubernur Jawa Timur Nomor: 871/5833.1/204.2/2021 tanggal 30 September 2021 tentang Usulan Kebutuhan PPPK Tahun Anggaran 2022;
- c. Bahwa jabatan dalam usulan pegawai pada poin (b) dimaksud merupakan *core business* organisasi yang mendukung kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur sehingga perlu diisi oleh Pegawai yang memiliki kualifikasi dan kompetensi melalui kenaikan pangkat penyesuaian ijazah; dan
- d. Berdasarkan pertimbangan huruf (a) dan (b) dimaksud perlu menetapkan Tambahan Alokasi Formasi Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang



⁻ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

[&]quot;Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

⁻ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

- Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
- 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;
- 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah; dan
- 7. Peraturan Gubernur Nomor 129 Tahun 2018 tentang Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.

Memperhatikan

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor: 18 Tahun 2015 tentang Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERTAMA :

- Tambahan alokasi formasi kenaikan pangkat penyesuaian ijazah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Formasi kenaikan pangkat penyesuaian ijazah harus didasarkan pada kebutuhan jabatan dan kualifikasi pendidikan sesuai dengan peta jabatan pada setiap perangkat daerah;
- Seluruh pihak yang berkepentingan wajib memastikan bahwa rincian formasi yang digunakan sebagai dasar kenaikan pangkat adalah sama dengan rincian formasi yang ditetapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur; dan
- c. Bagi PNS yang mengisi tambahan alokasi formasi jabatan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022, tidak dapat melakukan perpindahan jabatan minimal 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya Surat Keputusan Kenaikan Pangkat;

KEDUA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SURABAYA

Pada tanggal : 27 Desember 2022

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR



INDAH WAHYUNI, SH, M.Si

Pembina Utama Muda NIP. 19670409 199202 2 003



⁻ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

[&]quot; Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

⁻ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Lampiran Keputusan Kepala BKD Provinsi Jawa Timur

Nomor : 871/9311/204.2/2022 Tanggal : 27 Desember 2022

TAMBAHAN ALOKASI ALOKASI FORMASI KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2022

SEKRETARIAT DPRD PROVINSI JAWA TIMUR

1	O NAMA JABATAN	KIIAI IEIKASI PENININIKAN	ALOKASI FORMASI	IINIT KER IA
	2	3	4	5
	JUMLAH KESELURUHAN			
	Pengelola Tata Naskah	S1 Manajemen	1	Sekretariat DPRD

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KEPENDUDUKAN

N	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	UNIT KERJA
1	2	3	7	8
	JUMLAH KESELURUHAN			
	Pengelolaan Advokasi Konseling dan Pembinaan Keluarga	S1 Manajemen / S1 Ekonomi Manajemen / S1	1	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak
'	Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Ekonomi	ı	dan Kependudukan

DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	UNIT KERJA
1	2	3	7	8
	JUMLAH KESELURUHAN			
1	TPANNAINIA I ANAN PANANIAN	S1 Agroteknologi / S1 Agronomi / S1 Sosial Ekonomi Pertanian / S1 Pertanian	3	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

BIRO KESEJAHTERAAN SETDA

N	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	UNIT KERJA
1	2	3	7	8
	JUMLAH KESELUF	3		
1	IPendolah Data	S1 Manajemen / S1 Ilmu Hukum / S1 Hukum / S1 Administrasi Negara	3	Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah

RSUD dr. SAIFUL ANWAR

NO	NAMA JABATAN	I KIJAI IFIKASI PENDIDIKAN I	ALOKASI FORMASI	UNIT KER.IA
1	2	3	7	8
	JUMLAH KESELURUHAN			
1	Pengelola Penataan Sarana dan Prasarana	S1 Teknik Elektronika / S1 Teknik Elektro / S1 Teknik / S1 Elektronika	1	RSUD Saiful Anwar

RSUD dr. SOEDONO MADIUN

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	UNIT KERJA
1	2	3	7	8
	JUMLAH KESELUF	RUHAN	3	
1	Pengelola Keuangan	S1 Manajemen / S1 Administrasi Publik / S1 Ilmu Administrasi Negara / S1 Ekonomi	2	RSUD dr. Soedono Madiun
2	Verifikator Keuangan	S1 Manajemen / S1 Ekonomi	1	RSUD dr. Soedono Madiun

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	UNIT KERJA
1	2	3	7	8
	JUMLAH KESELUF	RUHAN	9	
1	Pengolah Data	S1 Hukum / S1 Ilmu Hukum	3	Satpol PP
2	Pengelola Informasi Kerjasama	S1 Hukum / S1 Ilmu Hukum	1	Satpol PP - Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum
3	Pengelola Data	S1 Hukum / S1 Ilmu Hukum	1	Satpol PP - Bidang Perlindungan Masyarakat
4	Pengelola Dokumentasi	S1 Hukum / S1 Ilmu Hukum	1	Satpol PP - Sekretariat
5	Pengelola Keuangan	S1 Hukum / S1 Ilmu Hukum / S1 Manajemen / S1 Akuntansi	1	Satpol PP - Sekretariat
6	Penata Laporan Keuangan	S1 Hukum / S1 Ilmu Hukum / S1 Manajemen / S1 Akuntansi	1	Satpol PP - Sekretariat
7	Pengelola Kepegawaian	S1 Hukum / S1 Ilmu Hukum / S1 Manajemen	1	Satpol PP - Sekretariat

BADAN PENDAPATAN DAERAH

NO	NAMA JABATAN	I KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	I IINIT KERJA
1	2	3	7	8
	JUMLAH KESELUF	1		
1	Pengelola Kepegawaian	S1 Manajemen / S1 Manajemen Sumber Daya Manusia	1	Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

NC	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	UNIT KERJA
1	2	3	7	8
	JUMLAH KESELURUHAN			
1	Pengelola Keuangan	S1 Manajemen / S1 Manajemen Keuangan / S1 Akuntansi		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi jawa Timur

DINAS PERHUBUNGAN

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	UNIT KERJA
1	2	3	7	8
	JUMLAH KESELUF	RUHAN	4	
1	Pengelola Terminal	S1 Hukum	1	Dinas Perhubungan - UPT P3 LLAJ Jember
2	Pengelola Terminal	S1 Hukum	1	Dinas Perhubungan - UPT P3 LLAJ Probolinggo
4	Pengolah Data	S1 Hukum	1	Dinas Perhubungan - Bidang Lalu Lintas Jalan
5	Pengolah Data	S1 Hukum	1	Dinas Perhubungan - UPT P3 LLAJ Bangkalan

BIRO UMUM

N	NAMA JABATAN	I KITALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	UNIT KERJA
1	2	3	7	8
	JUMLAH KESELURUHAN		2	
1	Pengolah Data	S1 Ilmu Hukum	1	Biro Umum Sekretariat Daerah
2	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	S1 Ilmu Hukum	1	Biro Umum Sekretariat Daerah

DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	UNIT KERJA
1	2	3	7	8
	JUMLAH KESELUF	RUHAN	11	
1	Verifikator keuangan	S1 Akuntansi / S1 Manajemen	1	Dinas PU Sumber Daya Air
2	Pengelola Kepegawaian	S1 Manajemen / S1 Ilmu Administrasi Negara		Dinas PU Sumber Daya Air - UPT PSDA WS Brantas Di Kediri
3	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	S1 Manajemen / S1 Ilmu Administrasi Negara	1 1	Dinas PU Sumber Daya Air - UPT PSDA WS Brantas Di Kediri
4	Pengelola Kepegawaian	S1 Manajemen Sumber Daya Manusia / S1 Manajemen		Dinas PU Sumber Daya Air - UPT PSDA WS Welang Pekalen Di Pasuruan
5	Pengelola Kegiatan Survey dan Perencanaan	S1 Teknik Sipil	1 4	Dinas PU Sumber Daya Air - UPT PSDA WS Bengawasn Solo di Bojonegoro
6	Pengelola Pemeliharaan Jaringan Irigasi	S1 Teknik Sipil		Dinas PU Sumber Daya Air - UPT PSDA WS Bengawasn Solo di Bojonegoro
7	Pengelola Kepegawaian	S1 Manajemen / S1 Ilmu Hukum / S1 Ilmu Administrasi Negara	1 1	Dinas PU Sumber Daya Air - UPT PSDA WS Bengawasn Solo di Bojonegoro

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR



INDAH WAHYUNI, SH, M.Si

Pembina Utama Muda NIP. 19670409 199202 2 003